

Perjanjian Baru sebagai Dasar Etika Politik Keterlibatan Umat Kristen di Ruang Publik

Jandri Roynando Sihite

Prodi S-1 Teologi Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Medan
roynandosihite@gmail.com

Abstract

The debate concerning the relationship between Christian faith and politics often places the church in an ambiguous position between an apolitical stance and pragmatic engagement. The New Testament, however, provides a framework of political ethics that affirms the public dimension of Christian faith. This article aims to examine political ethics in the New Testament and their relevance as a theological foundation for Christian involvement in the public sphere. This study employs a qualitative method with a biblical-theological approach through an analysis of key New Testament texts, particularly Jesus' teachings on the Kingdom of God and the ethical reflections of the apostles. The findings indicate that New Testament political ethics emphasize the principles of love, justice, truth, and service as the primary orientation of believers' public engagement. Christian involvement is not directed toward the pursuit of power, but toward social transformation grounded in the values of the Kingdom of God. Thus, New Testament political ethics provide a normative foundation for the church's critical, responsible, and integrity-driven presence in social and civic life.

Keywords: political ethics, New Testament, Christian engagement, public sphere

Abstrak

Perdebatan mengenai relasi iman Kristen dan politik sering menempatkan Gereja pada posisi ambigu antara sikap apolitis dan keterlibatan yang pragmatis. Perjanjian Baru, bagaimanapun, memuat kerangka etika politik yang menegaskan dimensi publik dari iman Kristen. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika politik dalam Perjanjian Baru serta relevansinya sebagai dasar teologis bagi keterlibatan Kristen di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan biblis-teologis melalui analisis teks-teks kunci Perjanjian Baru, khususnya ajaran Yesus tentang Kerajaan Allah dan refleksi etis para rasul. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika politik Perjanjian Baru menekankan prinsip kasih, keadilan, kebenaran, dan pelayanan sebagai orientasi utama keterlibatan publik orang percaya. Keterlibatan Kristen tidak diarahkan pada perebutan kekuasaan, melainkan pada transformasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Kerajaan Allah. Dengan demikian, etika politik Perjanjian Baru memberikan landasan normatif bagi kehadiran Gereja yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata kunci: etika politik, Perjanjian Baru, keterlibatan Kristen, ruang publik

Pendahuluan

Dalam konteks sosial-politik modern, keterlibatan umat Kristen di ruang publik sering kali menjadi topik yang memunculkan ketegangan antara iman dan kekuasaan. Di satu sisi, kekristenan memiliki mandat moral untuk menjadi garam dan terang dunia berdasarkan Mat. 5:13–16, tetapi di sisi lain, sejarah memperlihatkan adanya godaan untuk menjadikan iman sebagai alat legitimasi politik. Etika politik dalam Perjanjian Baru memberikan fondasi teologis yang menuntun umat dalam ruang publik secara bijaksana, dengan semangat kasih, keadilan, dan ketaatan kepada Kristus sebagai Raja segala raja.

Gagasan tentang etika politik dalam PB tidak lahir di ruang hampa. Dunia PB hidup di bawah hegemoni kekaisaran Romawi, di mana persoalan kekuasaan, keadilan, dan hukum menjadi kenyataan sehari-hari. Dalam konteks ini, para penulis PB seperti Paulus dan Petrus berbicara bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial orang-orang percaya. Pemahaman yang tepat terhadap etika politik PB menjadi sangat penting bagi Gereja masa kini, khususnya dalam konteks Indonesia yang plural, demokratis, dan sarat dinamika politik identitas.

Perdebatan mengenai keterlibatan Kristen dalam politik sering mengerucut pada dua ekstrem yaitu adanya kelompok yang menolak keterlibatan politik karena dianggap urusan duniawi dan kelompok yang justru menjadikan politik sebagai arena utama pelayanan rohani. Perjanjian Baru menawarkan keseimbangan yang teologis antara dua ekstrem ini, dengan menegaskan bahwa iman Kristen bersifat transformatif terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial dan politik.

Tulisan ini berusaha menelaah etika politik dalam Perjanjian Baru sebagai dasar keterlibatan Kristen di ruang publik. Melalui analisis terhadap teks-teks kunci seperti Roma 13:1–7 dan 1 Petrus 2:13–17, serta dengan meninjau pandangan etika politik Gereja mula-mula dan para teolog reformator. Tulisan ini menunjukkan bahwa iman Kristen memanggil umat untuk hadir secara aktif, kritis, dan etis dalam ruang publik tanpa kehilangan identitas Injil.

Metode Penelitian

Artikel ini, yang membahas Etika Politik dalam Perjanjian Baru sebagai Dasar Keterlibatan Kristen di Ruang Publik menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis fenomenologis terhadap konten digital di ruang Publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan memahami makna, nilai, dan relevansi Etika Politik dalam Perjanjian Baru terhadap praktik nyata keterlibatan Kristen di ruang publik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian teologis dan sosial yang menekankan pada interpretasi dan pemahaman makna secara mendalam dalam konteks historis dan kontemporer. Penelitian ini juga menggunakan perspektif *biblical hermeneutic* dan Analisis Fenomenologis.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Teologis Etika Politik dalam Perjanjian Baru

Etika politik dalam Perjanjian Baru bertumbuh melalui pengakuan mendasar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan ini memiliki dampak politis yang sangat kuat pada masa kekaisaran Romawi, karena menegaskan bahwa kuasa tertinggi bukan terletak pada Kaisar, melainkan pada Allah yang berdaulat atas sejarah. N. T. Wright menegaskan bahwa pengakuan “Yesus adalah Tuhan” dalam konteks Romawi merupakan pernyataan subversif terhadap ideologi kekaisaran yang menuhankan kuasa manusia.¹ Dengan demikian, seluruh

¹ N. T. Wright, *Paul and the Faithfulness of God* (Minneapolis: Fortress Press, 2013), 783.

etika politik Kristen berakar pada kerajaan Allah sebagai realitas yang menantang tatanan dunia yang tidak adil.

Etika politik Perjanjian Baru tidak dibangun atas dasar perebutan kekuasaan, melainkan pelayanan yang dalam Injil Matius 20:26 ditegaskan bahwa “Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu”. Yesus menolak pola kepemimpinan yang menindas dengan menegaskan bahwa dalam perspektif ini, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menghadirkan kebaikan dan keadilan Allah. Stanley Hauerwas menekankan bahwa etika Kristen adalah “etika komunitas yang terbentuk oleh narasi Injil,” di mana kekuasaan dilihat dalam bingkai salib, bukan paksaan.²

Selain itu, dasar etika politik PB juga berpijak pada prinsip cinta kasih (agape) sebagai hukum tertinggi. Rasul Paulus menulis, “Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia; karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat” (Rm. 13:10). Prinsip ini menjadi kriteria moral utama bagi setiap bentuk tindakan sosial dan politik orang percaya. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip kasih menuntun umat Kristen untuk mengutamakan kesejahteraan bersama di atas kepentingan kelompok.

Etika politik PB juga mencerminkan konsep keadilan Allah, yang bukan sekadar keadilan legalistik, melainkan keadilan yang memulihkan dan menebus.³ Dalam pelayanan Yesus, keadilan tampak nyata melalui pembelaan terhadap kaum miskin, tertindas, dan tersingkir. Gereja yang meneladani Kristus tidak dapat berdiam diri di tengah ketidakadilan sosial dan politik, tetapi terpanggil untuk menjadi saksi keadilan Allah di tengah masyarakat.

Etika Politik Gereja Mula-mula dan Konteks Kekaisaran Romawi

Etika politik Gereja mula-mula tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Kekaisaran Romawi abad pertama. Dunia tempat para rasul hidup adalah dunia di mana kekuasaan imperial menembus seluruh aspek kehidupan publik seperti hukum, ekonomi, agama, dan budaya. Dalam sistem ini, Kaisar tidak hanya dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi juga sebagai figur pusat penyembahan yang menuntut kesetiaan total.⁴ Karena itu, pengakuan Kristen bahwa “Yesus adalah Tuhan” secara implisit merupakan tindakan politis yang menolak absolutisme kekaisaran.

Kristen mula-mula tidak menentang kekuasaan Romawi secara revolusioner, tetapi menghadirkan alternatif etis dan spiritual terhadap logika kekuasaan duniawi. John Howard Yoder menyebut bahwa komunitas Kristen hidup di abad pertama merupakan masyarakat yang mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah tatanan kekaisaran yang penuh kekerasan.⁵ Meskipun Gereja tidak membentuk partai politik, tetapi Gereja menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah melalui solidaritas, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Surat Paulus kepada jemaat di Roma dan surat Petrus kepada jemaat diaspora menunjukkan strategi etis yang khas yaitu ketaatan yang kritis.

² Stanley Hauerwas, *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981), 72.

³ James D. G. Dunn, *The Theology of Paul the Apostle* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 341.

⁴ Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity*, 3rd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), 35–38.

⁵ John Howard Yoder, *The Politics of Jesus*, 2nd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 41–42.

Paulus menasihati, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah” (Rm. 13:1), sementara Petrus menulis, “Tunduklah kepada semua lembaga manusia karena Tuhan” (1 Ptr. 2:13). Teks-teks ini sering disalahpahami sebagai legitimasi terhadap otoritarianisme, padahal konteksnya menunjukkan panggilan untuk hidup tertib dan bermoral dalam sistem yang ada, sambil tetap mengakui bahwa Allah adalah otoritas tertinggi. William Barclay menafsirkan Roma 13 bukan sebagai dorongan untuk patuh secara buta, melainkan sebagai ajakan untuk memahami bahwa pemerintahan adalah alat Allah untuk menegakkan keteraturan, bukan instrumen penindasan.⁶ Ketika pemerintah menyimpang dari keadilan Allah, Gereja memiliki tanggung jawab profetis untuk bersuara. Karena itu, sejarah mencatat bahwa para martir Kristen tidak memberontak dengan pedang, tetapi dengan kesetiaan kepada iman yang menolak tunduk pada arogansi kekuasaan.

Etika politik Gereja mula-mula juga menampilkan solidaritas sosial lintas batas. Dalam masyarakat yang dikelas-kelaskan secara ketat seperti antara budak dan tuan, laki-laki dan perempuan, warga dan non-warga, komunitas Kristen menghadirkan tatanan baru yang setara di dalam Kristus (Gal. 3:28). Dengan cara ini, Gereja menjadi inspirasi dan teladan yang mendemonstrasikan tata sosial tanpa harus merebut kekuasaan negara.

Penafsiran Etis Roma 13:1–7 dan 1 Petrus 2:13–17

Kedua teks ini yakni Roma 13:1–7 dan 1 Petrus 2:13–17 merupakan fondasi klasik bagi pembahasan etika politik dalam Perjanjian Baru. Namun, keduanya juga sering disalahpahami sebagai legitimasi bagi pemerintahan otoriter. Untuk memahami maksud sebenarnya, perlu dibaca dalam konteks historis dan teologisnya.

1. Roma 13:1–7 Ketaatan dan Tanggung Jawab Sosial

Paulus menulis: “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.” (Rm. 13:1). Teks ini muncul dalam konteks Gereja Roma yang hidup di bawah kekuasaan Kaisar Nero, sekitar tahun 57 M. Dalam situasi seperti itu, ajakan Paulus bukanlah bentuk dukungan terhadap kekaisaran yang lalim, melainkan seruan untuk hidup tertib dan bermoral di tengah sistem yang tidak adil, tanpa kehilangan kesetiaan kepada Allah. N. T. Wright menegaskan bahwa Roma 13 harus dibaca bersama Roma 12 khususnya ayat 2, “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini”, sehingga ketaatan yang dimaksud bukanlah penyerahan diri total, melainkan ketaatan yang dibingkai oleh transformasi batin orang percaya.⁷

Bagi Paulus, pemerintah merupakan instrumen Allah untuk menjaga keteraturan sosial. Namun, ketika kekuasaan berubah menjadi tirani, maka tanggung jawab profetis Gereja adalah menegur dan menolak kejahatan dengan cara damai sebab ketaatan umat Kristen bersifat relatif, karena kesetiaan tertinggi hanya kepada Allah.

⁶William Barclay, *The Letter to the Romans* (Philadelphia: Westminster Press, 1975), 175.

⁷N. T. Wright, *Paul: In Fresh Perspective* (Minneapolis: Fortress Press, 2005), 126.

2. 1 Petrus 2:13–17 — Tunduk demi Kesaksian Injil

Surat 1 Petrus ditulis kepada orang-orang percaya yang mengalami penderitaan dan diskriminasi sosial. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada mereka, yaitu: “Tunduklah kepada semua lembaga manusia karena Tuhan, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada para penguasa sebagai utusannya...” (1 Ptr. 2:13–14). Makna utama nasihat ini bukan sebagai tindakan konformitas, melainkan kesaksian etis. Orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan integritas di hadapan masyarakat non-Kristen agar Injil tidak tercemar oleh perilaku buruk warganya. Barclay menjelaskan bahwa “ketaatan kepada pemerintah dalam surat Petrus dimaksudkan sebagai cara untuk memuliakan Allah di mata dunia, bukan sebagai penyerahan diri buta kepada kekuasaan.”⁸

Dengan demikian, baik Paulus maupun Petrus menekankan bentuk ketaatan yang sadar dan bernilai kesaksian. Keduanya mengajarkan bahwa kuasa negara memiliki fungsi menjaga keteraturan, tetapi tidak memiliki otoritas mutlak atas hati nurani umat Allah. Dalam hal ini, Gereja dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik sekaligus warga Kerajaan Allah yang kritis.

Ajaran Yesus Dasar Keterlibatan Kristen di Ruang Publik

Ajaran Yesus tentang Kerajaan Allah merupakan fondasi utama bagi etika politik Kristen. Dalam khotbah di bukit (Mat. 5–7), Yesus menampilkan visi moral yang menantang sistem perbudakan dan hegemoni kekuasaan pada zamannya. Prinsip seperti kasih kepada musuh (Mat. 5:44), kelemahlembutan, kerendahan hati, dan lapar akan keadilan (Mat. 5:6) menunjukkan bahwa etika politik Yesus berpusat pada transformasi batin dan solidaritas terhadap yang tertindas. Ketika Yesus mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah seperti yang tertulis dalam Matius 22:21, hal itu merupakan penegasan akan adanya pemisahan tanggung jawab antara negara dan iman. Yesus tidak mengajarkan pemberontakan politik, tetapi menolak pengkultusan pada kekuasaan duniawi. Dalam konteks ini, kerajaan Allah merupakan tatanan moral yang mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan manusia.

Keterlibatan Gereja di Ruang Publik dalam Perspektif Etika Perjanjian Baru

Etika politik Perjanjian Baru tidak hanya berbicara tentang moralitas pribadi, tetapi juga mengandung implikasi sosial yang luas. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk hadir secara aktif di ruang publik, bukan sebagai kekuatan politik partisan, melainkan sebagai komunitas etis yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah.

1. Ruang Publik sebagai Ruang Kesaksian

Dalam pemikiran teologis kontemporer, ruang publik dipahami sebagai wilayah pertemuan antara iman dan kehidupan sosial, ekonomi, serta politik. Dalam konteks ini, Gereja tidak dapat menarik diri secara eksklusif ke dalam ruang privat, karena

⁸ William Barclay, *The Letters of James and Peter* (Philadelphia: Westminster Press, 1976), 253.

panggilan Injil bersifat publik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa iman Kristen memiliki dimensi publik yaitu pengakuan Yesus sebagai Tuhan yang sekaligus menuntut keterlibatan dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi social

Etika politik Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kehadiran Kristen di ruang publik harus menjadi suara kenabian yang mengedepankan dialog kritis. Meskipun terlibat dalam percakapan publik dalam konteks mempercakapkan keresahan-keresahan publik, Gereja harus tetap menjaga diri agar suara moral yang diucapkan tidak menghakimi, tetapi juga harus menjadi mitra dialog yang membawa nilai kasih dan kebenaran dalam kebijakan publik. Keterlibatan ini harus dilakukan dengan rendah hati, mengakui kompleksitas dunia politik tanpa kehilangan komitmen pada nilai-nilai Injil.

2. Fungsi Profetis Gereja

Dalam tradisi kenabian Perjanjian Baru, Gereja memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran di tengah ketidakadilan. Yohanes Pembaptis menjadi contoh nyata: ia menegur Herodes karena moralitas politik yang rusak (Luk. 3:19–20). Sikap ini bukan pemberontakan politik, melainkan pembelaan terhadap integritas moral publik. Demikian pula, Yesus sendiri menegur para pemimpin agama dan politik karena penyalahgunaan kekuasaan yang menindas rakyat kecil (Mat. 23:23–28).

Dalam konteks masa kini, fungsi profetis ini menuntut Gereja untuk berani bersuara terhadap kebijakan publik yang tidak adil, eksploitasi ekonomi, korupsi, kekerasan, atau diskriminasi. Namun, kritik Gereja harus disertai dengan teladan moral yang konsisten dalam kehidupan internalnya sendiri. Etika politik Kristen menuntut keselarasan antara kata dan tindakan.

3. Partisipasi Sosial dan Politik Kristen

Partisipasi Kristen di bidang sosial dan politik harus berakar pada misi Allah (*missio Dei*), yaitu keterlibatan Allah dalam dunia untuk menebus dan memperbaiki ciptaan. Karena itu, setiap tindakan politik orang Kristen seharusnya mencerminkan partisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Gereja tidak dipanggil untuk mendominasi ruang publik, tetapi untuk mewujudkan *Shalom*, adil, dan harmonis bagi seluruh ciptaan.⁹

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan Kristen di ruang publik memiliki arti strategis. Di tengah masyarakat plural, Gereja perlu hadir sebagai *jembatan rekonsiliasi* dan pelaku etika publik yang mengedarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Partisipasi politik Kristen bukan soal merebut kekuasaan, melainkan mempraktikkan kasih Allah dalam kebijakan dan tindakan sosial yang nyata.

⁹Nicholas Wolterstorff, *Justice: Rights and Wrongs* (Princeton: Princeton University Press, 2008),

Hubungan Etika Politik dalam Perjanjian Baru dengan Kondisi Indonesia Masa kini

Konteks sosial-politik Indonesia yang majemuk dan demokratis menghadirkan tantangan etis yang kompleks bagi umat Kristen. Dalam situasi ini, etika politik Perjanjian Baru menyediakan prinsip-prinsip normatif yang relevan untuk membentuk keterlibatan Kristen yang kritis, konstruktif, dan penuh kasih di ruang publik.

1. Integritas Moral di Tengah Krisis Etika Politik

Krisis etika dalam dunia politik Indonesia, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik uang, menuntut kehadiran saksi-saksi iman yang berintegritas. Dalam Perjanjian Baru, integritas politik berakar pada panggilan untuk mengasihi Allah dan sesama (Mat. 22:37–39). Prinsip ini menegaskan bahwa kuasa politik harus dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk melayani kebaikan bersama (common good).

Paulus menasihatkan agar setiap pemimpin dan warga Kristen “melakukan apa yang baik di hadapan semua orang” (Rm. 12:17). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti menolak segala bentuk praktik politik yang tidak etis dan mempromosikan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Gereja perlu mendidik warganya untuk menjadi agen moral di tengah sistem politik yang sering terdistorsi oleh kepentingan pragmatis.

2. Keadilan Sosial dan Solidaritas Antarumat Beragama

Etika politik Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kasih dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Kasih tanpa keadilan menjadi sentimental, sementara keadilan tanpa kasih menjadi keras. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang pluralistik, di mana kehidupan beragama kerap diwarnai oleh prasangka dan diskriminasi. Keterlibatan Kristen dalam politik harus memperjuangkan keadilan sosial bagi semua, termasuk bagi kelompok minoritas dan masyarakat marginal.

Seperti yang ditegaskan oleh Yesus dalam Lukas 4:18–19, misi Mesias adalah membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi yang tertindas, dan pemulihan bagi yang terpinggirkan. Nilai ini mendorong Gereja untuk aktif dalam advokasi sosial, pendidikan politik etis, dan pelayanan kemanusiaan lintas agama.

3. Pelayanan Publik sebagai Panggilan Teologis

Etika politik Perjanjian Baru tidak memisahkan iman dan kehidupan sosial. Keterlibatan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan merupakan bagian dari panggilan teologis (vocatio) setiap orang percaya. Calvin menegaskan bahwa setiap pekerjaan di dunia, termasuk pemerintahan, adalah bentuk pelayanan kepada Allah.¹⁰ Dengan demikian, partisipasi orang Kristen dalam pemerintahan, partai politik, maupun lembaga sosial bukanlah sekadar pilihan karier, melainkan panggilan spiritual untuk

¹⁰ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, IV.xx.3.

memuliakan Allah melalui pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kejujuran, keadilan, kasih, dan perdamaian di dalam kebijakan publik dan perilaku politik sehari-hari.

4. Gereja sebagai Komunitas Pembentuk Etika Publik

Akhirnya, Gereja dipanggil untuk menjadi pusat Pendidikan moral yang mempersiapkan umat untuk hadir di ruang publik dengan karakter Kristus. Pembinaan iman tidak cukup berhenti pada spiritualitas pribadi, tetapi harus mencakup pembentukan kesadaran sosial-politik. Gereja perlu mengintegrasikan **pendidikan** etika politik Kristen dalam kurikulum teologinya, khotbah, dan program pengabdian masyarakat. Dengan demikian, Gereja tidak hanya mengkritik kondisi bangsa, tetapi juga melahirkan kader-kader publik yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Dalam semangat ini, keterlibatan politik Kristen di Indonesia menjadi perwujudan iman yang bekerja melalui kasih (Gal. 5:6) dan menjadi saksi hidup akan kehadiran kerajaan Allah di tengah bangsa.

Kesimpulan dan Implikasi Teologis

Etika politik dalam Perjanjian Baru memberikan fondasi teologis yang kokoh bagi keterlibatan Kristen di ruang publik. Analisis terhadap ajaran Yesus, tulisan Paulus, etika Gereja perdana, serta pandangan tokoh reformator seperti Agustinus, Luther, dan Calvin menunjukkan bahwa iman Kristen tidak bersifat apolitik, tetapi menuntun umat untuk hadir secara etis, kritis, dan transformatif dalam masyarakat.

1. Prinsip-prinsip Etika Politik Perjanjian Baru

Berdasarkan kajian penulis diatas, dapat dirumuskan beberapa prinsip utama:

- a. Kedaulatan Kristus atas seluruh kehidupan: Kesetiaan kepada Allah adalah landasan moral bagi setiap tindakan politik.
- b. Pelayanan dan kepemimpinan yang rendah hati: Kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan menindas.
- c. Kasih dan keadilan sebagai orientasi moral: Tindakan politik harus mencerminkan kasih Allah dan menegakkan keadilan sosial.
- d. Ketaatan kritis terhadap pemerintah: Kesetiaan kepada negara bersifat relatif dan dibingkai oleh prinsip moral ilahi.
- e. Solidaritas dan advokasi bagi yang tertindas: Gereja dipanggil menjadi suara bagi mereka yang terpinggirkan dan marginal.

2. Implikasi Teologis dan Praktis bagi Gereja

Implikasi teologis dari prinsip-prinsip ini bagi Gereja kontemporer sangat luas:

- a. Gereja harus hadir di ruang publik sebagai komunitas profetis, memberi teladan moral dan mengadvokasi keadilan.
- b. Pendidikan teologi harus mencakup etika politik Kristen, sehingga umat dilatih untuk menjadi warga yang bertanggung jawab.

- c. Keterlibatan dalam pemerintahan, lembaga sosial, dan kehidupan publik harus dilandasi panggilan teologis, bukan ambisi pribadi atau kelompok.
- d. Gereja di Indonesia, dalam konteks pluralitas dan demokrasi, memiliki peran strategis sebagai jembatan perdamaian dan agen rekonsiliasi sosial.

Kesimpulannya, etika politik Perjanjian Baru membimbing umat Kristen untuk menjadi warga negara yang berintegritas, pemimpin yang melayani, dan komunitas yang menyuarkan keadilan Allah. Keterlibatan ini tidak memerlukan dominasi politik, tetapi kesaksian hidup yang konsisten dengan Injil. Gereja yang hidup sesuai prinsip ini akan mampu menghadirkan transformasi sosial dan moral, sehingga ruang publik menjadi arena di mana kasih dan keadilan Allah nyata dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus. *The City of God*. Translated by Henry Bettenson. London: Penguin Books, 2003.
- Barclay, William. *The Letter to the Romans*. Philadelphia: Westminster Press, 1975.
- Barclay, William. *The Letters of James and Peter*. Philadelphia: Westminster Press, 1976.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
- Dunn, James D. G. *The Theology of Paul the Apostle*. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- Ferguson, Everett. *Backgrounds of Early Christianity*. 3rd ed. Grand Rapids: Eerdmans, 2003.
- Guthrie, Donald. *Teologi Perjanjian Baru 3: Eklesiologi, Eskatologi, dan Etika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Hakh, Samuel Benyamin. *Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Hauerwas, Stanley. *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981.
- Keener, Craig S. *The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 2009.
- Luther, Martin. *Temporal Authority: To What Extent It Should Be Obeyed* (1523). In *Luther's Works*, vol. 45, 81–94. Philadelphia: Fortress Press, 1962.
- Sandriana, Natassa. *Dari Hukum Taurat ke Hukum Sempurna: Menjalani Etika Kristen dalam Kehidupan*. Karyanirwasita Kreatif Media, 2025
- Sibarani, Poltak Y.P. *Etika Kristen Masa Kini*. KBM Indonesia, 2025.
- Stott, John R. W. *Romans: God's Good News for the World*. Downers Grove: IVP, 1994.
- Volf, Miroslav. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids: Brazos Press, 2011.
- Wolterstorff, Nicholas. *Justice: Rights and Wrongs*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Wright, N. T. *Paul and the Faithfulness of God*. Minneapolis: Fortress Press, 2013.
- Wright, N. T. *Paul: In Fresh Perspective*. Minneapolis: Fortress Press, 2005.